

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH FISKAL DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI**

**ALFIAH ZHAFIRA RAMADHANI**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH FISKAL DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**ALFIAH ZHAFIRA RAMADHANI**

**A011201096**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

SKRIPSI

PENGARUH FISKAL DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN  
PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

disusun dan diajukan oleh

ALFIAH ZHAFIRA RAMADHANI

A011201096

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 20 Agustus 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Rahmatia, S.E., MA.

NIP. 19630625 198702 2 004

Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si., CPF.

NIP. 19660811 199103 2 001



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, S.E., M.Si. CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

## PENGARUH FISKAL DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

disusun dan diajukan oleh

**ALFIAH ZHAFIRA RAMADHANI**

**A011201096**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Makassar, 20 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Rahmatia, S.E., MA.	Ketua	1. ....
2.	Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si., CPF.	Sekretaris	2. ....
3.	Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si.	Anggota	3. ....
4.	Randi Kumiawan, S.E., M.Sc.	Anggota	4. ....



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Salir, S.E., M.Si. CWM@  
NIP. 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alfiah Zhafira Ramadhani

NIM : A011201096

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Fiskal Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Alfiah Zhafira Ramadhani

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Fiskal Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi”** sebagai syarat meraih gelar sarjana ekonomi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa manusia dari alam gelap gulita menuju terang benderang, dari lembah kejahiliyaan menuju puncak kejayaan Islam.

Proses penyelesaian tugas akhir ini merupakan suatu perjuangan dan tantangan yang melelahkan, namun juga memberikan kepuasan. Penulis berhasil mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang muncul dalam perjalanan penyelesaian tugas ini. Namun, penyelesaian tugas akhir dan perolehan gelar sarjana ekonomi hanyalah sebuah pencapaian kecil dalam perjalanan hidup yang panjang yang akan penulis hadapi di masa depan. Sebelum memasuki tahap selanjutnya yang pastinya akan lebih sulit, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting dalam hidup penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis tersayang, Papa Usman dan Mama Asma dan saudara-saudara penulis yaitu Asty dan Rey. Terima kasih atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi,

nasehat, perhatian, serta pengorbanan yang diberikan sehingga membuat penulis selalu merasa bersyukur mempunyai kalian dalam hidup penulis. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuan yang telah diberikan, yakni kepada:

1. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sabir S.E., M.Si., CWM® dan Sekretaris Departemen Ibu Dr. Fitriwati, S.E., M.Si. Terima Kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
2. Dosen pembimbing, Ibu Prof. Dr. Rahmatia, S.E., MA. dan Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si., CPF. yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pemikiran dalam memberikan masukan, arahan, dan motivasi pada penulis dari awal hingga tahap penyelesaian skripsi.
3. Bapak Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si dan Bapak Randi Kurniawan, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam penelitian ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki, serta kelancaran segala urusannya, aamiin.
4. Ibu Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA. selaku dosen penasihat akademik penulis. Terima kasih atas segala nasihat dan dampingannya dari awal perkuliahan hingga akhir studi dari penulis. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki, serta kelancaran segala urusannya, aamiin.

5. Kepada seluruh dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhususnya Dosen Ilmu Ekonomi yang menginspirasi dan dengan rendah hati mengajarkan terkait pemikiran-pemikiran ekonomi. Terima kasih penulis ucapkan atas segala ilmu yang diberikan.
6. Kepada seluruh staf dan pegawai di Departemen Ilmu Ekonomi, yang telah membantu dan memberikan segala informasi kepada penulis.
7. Teruntuk orang yang sangat saya cintai dan sangat berarti, Ariel Syahrin. Terima kasih karena telah senantiasa mendengar keluh kesah, membantu, dan memberikan segala dukungan kepada saya. Terima kasih sudah selalu ada dan saya sangat beruntung telah bertemu dan memiliki anda di dalam hidup saya.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2020 terkhususnya, Zahra, Dea, Wanda, Putri, Mila, Deby, Khahira, Nasriah, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah kebersamai penulis selama masa-masa kuliah penulis.
9. Teruntuk teman-teman KKN Penulis. Terima kasih karena telah menemani penulis membuka lembaran baru dalam hidup dan memberikan pengalaman yang tak akan pernah dilupakan.
10. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Alfiah. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

## ABSTRAK

### PENGARUH FISKAL DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SULAWESI

Alfiah Zhafira Ramadhani  
Rahmatia  
Sri Undai Nurbayani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fiskal daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yakni data ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB ADHK, dana TKDD atau dana perimbangan dan realisasi belanja modal pemerintah yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah yakni Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi. Namun, secara tidak langsung dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, yang artinya peningkatan alokasi dana perimbangan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja modal secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi, yang artinya peningkatan belanja modal mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi. Namun, secara tidak langsung belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

## ABSTRACT

### THE EFFECT OF REGIONAL FISCAL ON INCOME INEQUALITY IN SULAWESI ISLAND

Alfiah Zhafira Ramadhani  
Rahmatia  
Sri Undai Nurbayani

This study aims to analyze the effect of regional fiscal on income inequality in Sulawesi Island. The data used in this study are quantitative secondary data, namely income inequality data measured by the Gini index, economic growth measured by ADHK GRDP, TKDD funds or balancing funds and realization of government capital expenditures published by government agencies, namely the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. The data analysis method used is path analysis. The results of this study indicate that directly balancing funds have no significant effect on income inequality in Sulawesi Island. However, indirectly, balancing funds have a negative and significant effect on income inequality through economic growth, which means that an increase in the allocation of balancing funds can reduce income inequality through economic growth. Meanwhile, capital expenditure directly has a negative and significant effect on income inequality on Sulawesi Island, which means that an increase in capital expenditure can reduce income inequality on Sulawesi Island. However, capital expenditure indirectly has no significant effect on income inequality through economic growth.

**Keywords:** Income Inequality, Economic Growth, Balance Fund, Capital Expenditure.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	13
1.3    Tujuan Penelitian .....	13
1.4    Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1    Landasan Teori.....	15
2.1.1    Ketimpangan Pendapatan .....	15
2.1.2    Pertumbuhan Ekonomi .....	20
2.1.3    Dana Alokasi Umum .....	23
2.1.4    Belanja Modal.....	25
2.2    Hubungan Antar Variabel.....	28
2.2.1    Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	28
2.2.2    Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	30
2.2.3    Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	32
2.2.4    Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	34

2.2.5	Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	36
2.3	Studi Empiris .....	38
2.4	Kerangka Konseptual .....	43
2.5	Hipotesis Penelitian .....	44
<b>BAB III</b>	.....	<b>46</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>46</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	46
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	46
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	47
3.4	Metode Analisis Data .....	47
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	56
<b>BAB IV</b>	.....	<b>58</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>58</b>
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	58
4.2	Perkembangan Umum Variabel Penelitian.....	62
4.2.1	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan .....	62
4.2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi .....	66
4.2.3	Perkembangan Dana Perimbangan.....	69
4.2.4	Perkembangan Belanja Modal.....	72
4.3	Hasil Estimasi.....	75
4.3.1	Pengaruh Langsung Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	77
4.3.2	Pengaruh Langsung Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	79
4.3.3	Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	80
4.4	Pembahasan Hasil Estimasi Penelitian.....	82
4.4.1	Pengaruh Dana Perimbangan Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	82
4.4.2	Pengaruh Belanja Modal Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	84
<b>BAB V</b>	.....	<b>87</b>

<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Gini Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023.....	6
Tabel 4.1	Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	77
Tabel 4.2	Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	79
Tabel 4.3	Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pada 6 Provinsi di Pulau Sulawesi.....	5
Gambar 1.2	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi.....	7
Gambar 1.3	Perkembangan Dana Perimbangan di Pulau Sulawesi.....	10
Gambar 1.4	Perkembangan Belanja Modal di Pulau Sulawesi.....	11
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	44
Gambar 4.1	Uji Chow Persamaan Struktural I.....	76
Gambar 4.2	Uji Chow Persamaan Struktural II.....	76
Gambar 4.3	Uji Hausman Persamaan Struktural I.....	77
Gambar 4.4	Uji Hausman Persamaan Struktural II.....	77
Gambar 4.5	Bagan Hasil Penelitian.....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap negara di dunia ini memiliki tujuan yang sama yang hendak dicapai, yakni meningkatkan standar dan kualitas hidup serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera harus dilaksanakan pembangunan. Todaro & Smith (2013) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomi dan sosial. Selain itu, Nangarumba (2015) juga menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan serta berkelanjutan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya.

Konsep pembangunan sendiri mencakup upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk mencapai perbaikan kondisi hidup masyarakat, dengan fokus pada peningkatan standar hidup, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan distribusi pendapatan. Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan telah menjadi landasan utama bagi kemajuan suatu negara. Dalam era globalisasi seperti sekarang, negara-negara saling bersaing secara aktif untuk meningkatkan pembangunan mereka melalui berbagai aspek. Persaingan ini tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara berusaha menciptakan kebijakan dan strategi yang inovatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak mencakup seluruh gambaran pembangunan, namun peningkatan PDRB sering dianggap sebagai tanda kemajuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat secara umum dianggap dapat meningkatkan pendapatan rata-rata dalam masyarakat. Namun meningkatnya pendapatan masyarakat tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua unsur yang penting dalam proses pembangunan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa diantara kedua aspek tersebut seringkali terjadi *trade off* antara yang satu dan lainnya, yaitu bilamana mendahulukan pemerataan maka akan cenderung memperlambat proses pertumbuhan (Sjafrizal, 2008).

Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, ketimpangan juga dapat dipandang tidak adil dalam kasus ketimpangan pendapatan yang ekstrim (Todaro & Smith,

2013). Masalah ketimpangan atau disparitas pendapatan ini tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang saja, melainkan negara-negara maju juga mengalaminya. Namun, perbedaannya hanya terletak pada seberapa besar atau seberapa parah tingkat ketimpangan yang sedang mereka alami, serta faktor apa saja yang mendominasi masalah ketimpangan yang sedang terjadi itu pada negara mereka (Damanik dkk., 2018).

Perbedaan dalam pendapatan sangat terlihat di sebagian besar negara sedang berkembang, seperti halnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku, ras, budaya, dsb juga letak geografisnya, dimana hal ini tentu saja menimbulkan perbedaan ketersediaan kandungan sumber daya alam antar daerah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan persebaran sarana serta prasarana yang dinilai belum merata. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda yang kemudian hal ini dapat menimbulkan adanya keterbelakangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya sehingga akhirnya mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang masyarakat peroleh.

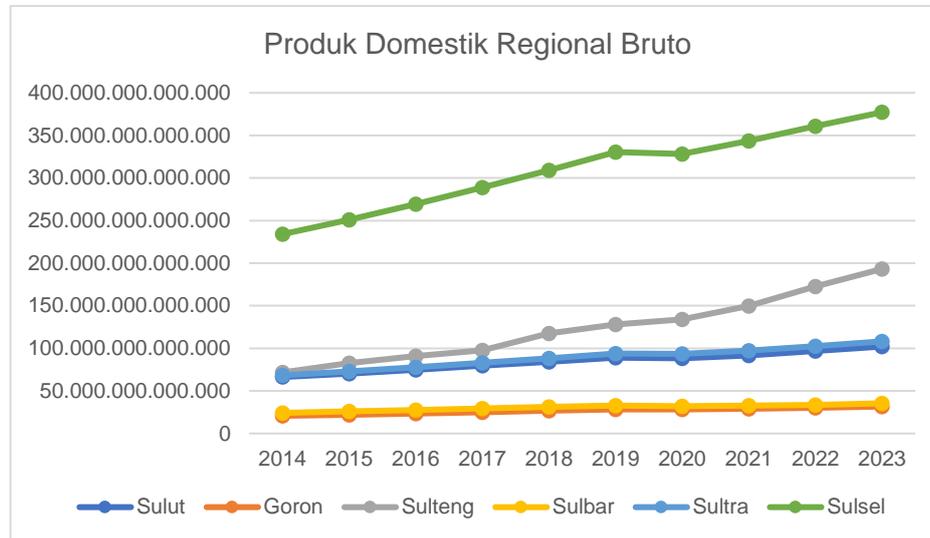
Indikator distribusi pendapatan dalam Arsyad (2010) dapat diukur salah satunya berdasarkan koefisien gini. BPS menggunakan indeks gini (*gini ratio*) di mana kisaran angka indeks gini berada diantara 0 hingga 1. Besaran angka rasio gini memiliki makna tingkatan ketimpangan yang dimiliki suatu daerah. Rasio di bawah 0,3 diklasifikasikan dalam kategori rendah, rasio 0,3-0,5 diklasifikasikan dalam kategori sedang, serta rasio di atas 0,5 diklasifikasikan dalam kategori tinggi (Machmud, 2016).

Sebagai salah satu wilayah di Indonesia, Pulau Sulawesi dengan 6 provinsi yang didukung oleh data Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam tahun terakhir, yakni 2023. Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa Sulawesi merupakan pulau dengan capaian pertumbuhan tertinggi pada ekonomi Indonesia secara spasial di triwulan II-2023. Dengan sumber pertumbuhan utamanya ialah industri pengolahan; pertambangan dan penggalan; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Proses kemajuan pembangunan dalam suatu daerah dapat digambarkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi upaya pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi dalam suatu negara berhasil jika pertumbuhan ekonomi diiringi dengan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan. Tujuan pembangunan yang seharusnya dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi ialah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi (Zusanti dkk., 2018).

Tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, semakin tinggi angka PDRB maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Berikut data nilai PDRB setiap Provinsi di Pulau Sulawesi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

**Gambar 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi pada 6 Provinsi di Pulau Sulawesi**



*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan PDRB antar Provinsi di Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai PDRB paling besar di Pulau Sulawesi. Nilai PDRB yang paling kecil di Pulau Sulawesi ialah Provinsi Gorontalo. Setiap provinsi di Pulau Sulawesi ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Besarnya nilai PDRB setiap Provinsi bervariasi tentunya mengindikasikan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi. PDRB yang semakin meningkat dalam suatu provinsi menunjukkan potensi wilayah yang semakin besar.

Hal ini disebabkan karena setiap provinsi memiliki keunggulan komparatif berbeda, seperti perbedaan sumber daya alam, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia pada setiap wilayah, struktur kependudukan, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi yang berbeda pada

daerah tertentu ada yang tinggi dan alokasi dana pembangunan yang berbeda antar daerah (Istiqamah dkk., 2018).

Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, beberapa provinsi di Pulau Sulawesi mengalami ketimpangan pendapatan yang signifikan dalam tahun terakhir, sehingga masuk dalam 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling tinggi. Untuk melihat seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi berdasarkan provinsi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data rasio gini dengan nilai tertinggi pada tahun terakhir yakni 2023.

**Tabel 1.1 Indeks Gini Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023**

NO	Provinsi	Rasio Gini Tahun 2023
1.	D.I Yogyakarta	0,449
2.	DKI Jakarta	0,431
3.	Jawa Barat	0,425
<b>4.</b>	<b>Gorontalo</b>	<b>0,417</b>
5.	Jawa Timur	0,387
6.	Papua	0,386
<b>7.</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>0,377</b>
8.	Nusa Tenggara Barat	0,375
<b>9.</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>0,371</b>
10.	Papua Barat	0,370

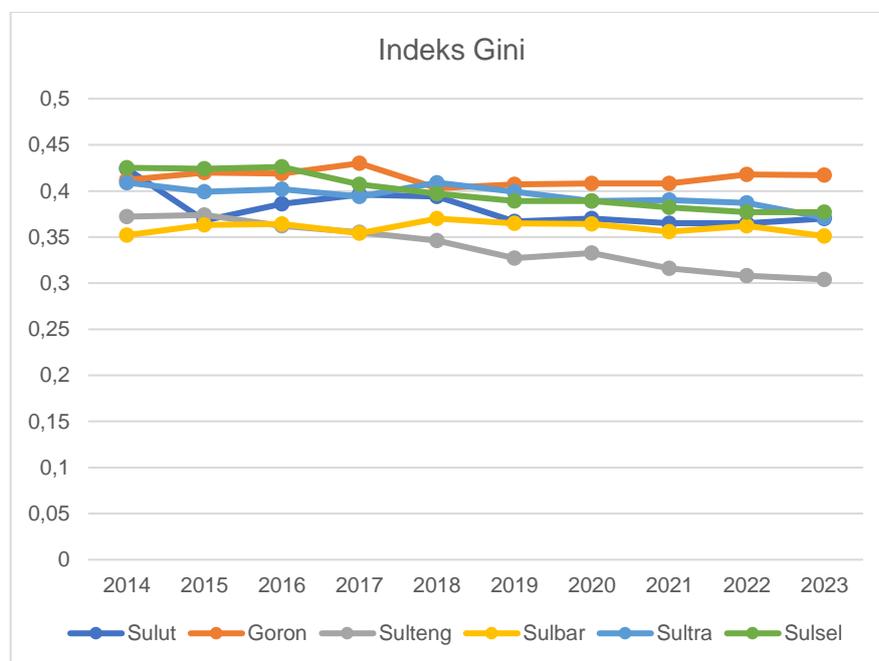
*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan Tabel 1.1 yang telah disajikan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat sebagian provinsi di Pulau Sulawesi, yakni Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang termasuk ke dalam 10 provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia berdasarkan data nilai indeks gini yang

dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan tiga provinsi lainnya dengan nilai tertinggi selanjutnya secara berurutan, yakni Provinsi Sulawesi Utara berada di angka 0,370, diikuti dengan Provinsi Sulawesi Barat yang berada di angka 0,351, dan terakhir provinsi dengan nilai indeks gini terendah dari keenam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, ialah Provinsi Sulawesi Tengah, yang berada di angka 0,304.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Pulau Sulawesi ini tidak dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata sebab kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di enam provinsi di Pulau Sulawesi masih mengalami keadaan yang fluktuatif, dengan kecenderungan yang meningkat tiap tahunnya. Berikut data ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini di Pulau Sulawesi dalam 10 tahun terakhir, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

**Gambar 1.2 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik data diatas dapat dilihat bahwa tren ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini di enam provinsi di Pulau Sulawesi mengalami keadaan yang fluktuatif, yakni terkadang mengalami peningkatan terkadang juga mengalami penurunan, namun dengan kecenderungan meningkat tiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2014 hingga 2023. Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang menunjukkan perkembangan positif yang dapat dilihat dari nilai indeks ginya yang terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan perkembangan ketimpangan yang positif sebab dalam 8 tahun terakhir, nilai indeks ginya terus menurun yang artinya ketimpangan pendapatannya terus berkurang.

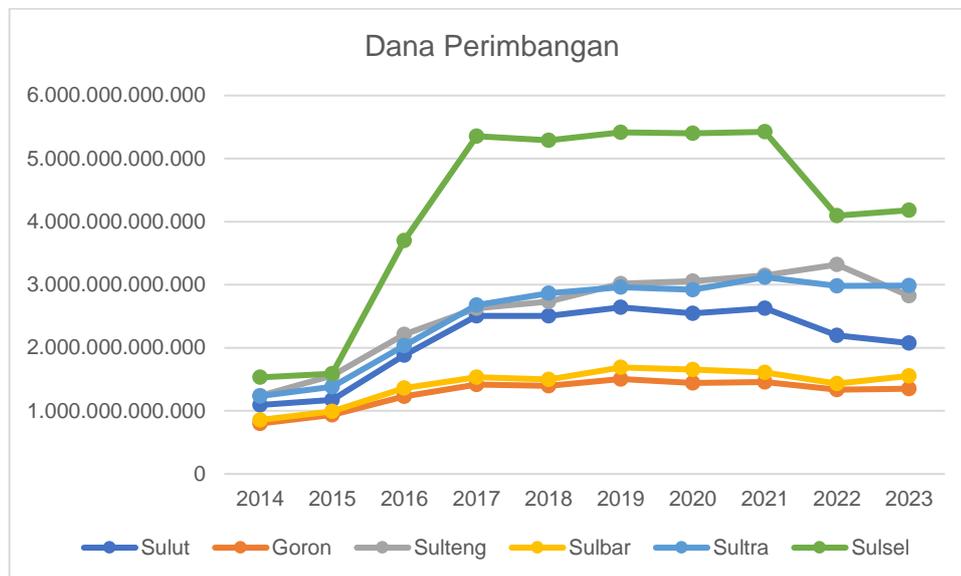
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi agar perekonomian menuju pada kondisi yang diinginkan. Salah satu instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi adalah melalui fiskal (Waluyo, 2017). Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan baik penerimaan pendapatan dari berbagai macam sumber pendapatan seperti pajak maupun pengeluaran pemerintah serta mobilisasi sumber daya dengan tujuan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam situasi resesi atau membatasi pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat untuk mencegah terjadinya inflasi. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di suatu wilayah. Tujuan akhir dari kebijakan fiskal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengurangi

kesenjangan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, APBN berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan. Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah mengalokasikan APBN ke wilayah melalui Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Kebijakan alokasi anggaran melalui TKDD dan belanja K/L tersebut secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan keamanan (Nasution, 2020).

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yakni Dana Perimbangan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yakni belanja modal merupakan kedua instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah. Dana perimbangan pada TKDD merupakan suatu alat investasi jangka pendek hingga jangka panjang pemerintah untuk mencapai pembangunan daerah yang merata (Purba dan Simandjorang, 2024). Adapun dana perimbangan sendiri meliputi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut data dana perimbangan di Pulau Sulawesi dalam 10 tahun terakhir, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Gambar 1.3 Perkembangan Dana Perimbangan di Pulau Sulawesi**



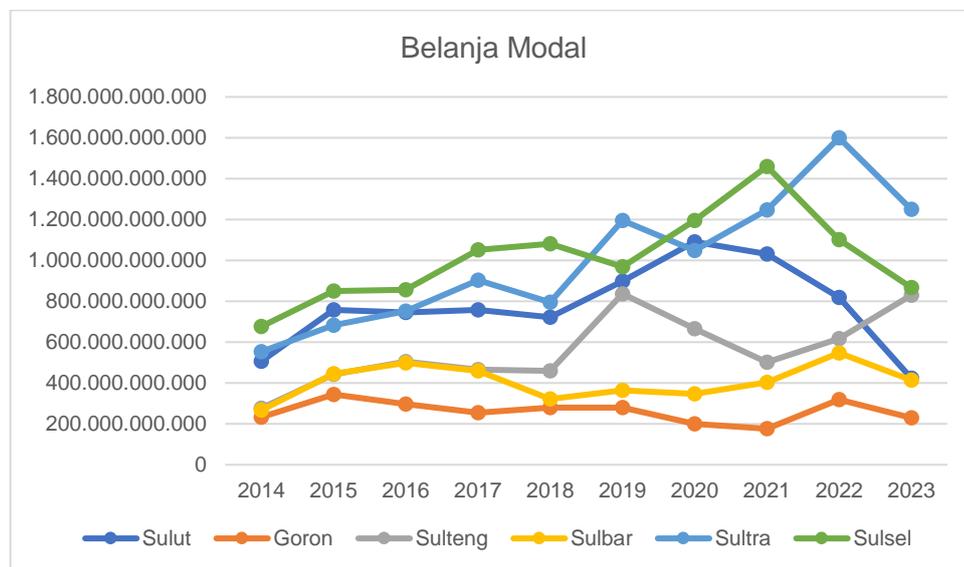
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan grafik data diatas dapat dilihat bahwa dana perimbangan di enam provinsi di Pulau Sulawesi mengalami keadaan yang fluktuatif, yakni terkadang mengalami peningkatan dan terkadang juga mengalami penurunan. Namun, dengan kecenderungan yang meningkat tiap tahunnya. Seluruh provinsi, kecuali Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan alokasi dari tahun 2021 ke 2022, yang mana hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan fiskal atau penyesuaian anggaran yang terkait dengan kondisi ekonomi pada tahun tersebut, dimana pada tahun tersebut telah terjadi pandemi Covid-19.

Selain dari dana perimbangan, indikator lain yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Belanja modal merupakan salah satu instrumen kebijakan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anshari dkk., (2018)

mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja modal dapat dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Berikut data pengeluaran pemerintah melalui belanja modal di Pulau Sulawesi dalam 10 tahun terakhir, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Gambar 1.4 Perkembangan Belanja Modal Pemerintah di Pulau Sulawesi**



*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*

Berdasarkan grafik data diatas dapat dilihat bahwa belanja modal pemerintah di Pulau Sulawesi juga mengalami keadaan yang fluktuatif, yakni terkadang mengalami peningkatan dan terkadang juga mengalami penurunan. Namun, dengan kecenderungan yang meningkat tiap tahunnya.

Meskipun ketimpangan pada distribusi pendapatan hampir tidak mungkin dihilangkan sama sekali, namun upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari berbagai dampak negatif

yang dapat ditimbulkan akibat tingginya ketimpangan tersebut. Tingginya ketimpangan dapat mengancam kestabilan kondisi sosial-ekonomi di antaranya potensi munculnya dampak negatif terutama terhadap kohesi sosial politik (Bappenas, 2017). Jadi, meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung cukup tinggi, namun akan muncul persepsi publik bahwa kesejahteraan belum dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga keadilan dan pemerataan belum terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan antarkelompok sosial-ekonomi dan antar wilayah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional.

Dana perimbangan dan belanja modal sangat penting dalam memahami ketimpangan pendapatan karena kedua variabel ini berperan langsung dalam distribusi sumber daya dan investasi infrastruktur di berbagai wilayah. Dana perimbangan sebagai alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal seringkali dirancang untuk mengurangi ketimpangan keuangan atau ekonomi antar wilayah dengan memberikan dana lebih besar kepada daerah yang kurang berkembang. Selanjutnya, melalui belanja modal, pemerintah dapat fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur, yang kemudian hal ini akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja akan terbuka lebar, banyak orang yang akan bekerja dan mendapat penghasilan, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap bagaimana dana perimbangan dan belanja modal ini dialokasikan dan digunakan dapat memberikan solusi untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan distribusi pendapatan lebih merata dan inklusif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Fiskal Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penjelasan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi.
2. Menjadi literatur dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Pada dasarnya, ketimpangan atau kesenjangan merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara, baik itu pada negara berkembang maupun negara maju. Hal ini umumnya terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Hadju dkk., 2021). Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*).

Lebih lanjut, menurut Kuncoro (2006) ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan pada *endowment factor*. *Endowment factor* atau secara harfiah “jumlah faktor” mengacu pada stok faktor produksi di suatu negara. Faktor produksi yang dimaksud, ialah tanah, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2009).

Adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang besar antar wilayah membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial dan politik. Dari segi ekonomi menurut Sjafrizal (2014) menyebabkan kurang efesiennya penggunaan sumber

daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam pendapatan. Ketidakmerataan dalam pendapatan ini yang disebut dengan ketimpangan pendapatan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan di kalangan masyarakat. Sebagaimana menurut Hartisa dan Putri (2021) bahwa ketimpangan pendapatan adalah kesenjangan kemakmuran ekonomi antara pendapatan yang kaya dengan yang miskin dimana pendapatan riil yang kaya terus bertambah dan yang miskin terus berkurang. Adapun menurut Glaeser (2006), ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata yang ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, dan berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights*.

Menurut Tambunan (2001), Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami masalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan terjadi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Todaro & Smith (2013), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Lebih lanjut Todaro & Smith mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menimbulkan berbagai dampak antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta dianggap tidak adil.

Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2006), seorang ekonom klasik menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di negara miskin pada awalnya

cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped patern*). Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan Ketimpangan Pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari.

Lebih lanjut Kuznets menjelaskan ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut.

Menurut Adelman dan Morris (1973) dalam (Arsyad, 2010) ada delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yakni: (1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mana hal ini dapat memicu penurunan pendapatan per kapita; (2) Inflasi di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti oleh pertambahan produksi barang; (3) ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (4) Investasi padat modal yang lebih besar dari investasi padat karya. Investasi padat modal, yang mengarah pada penggunaan teknologi dan mesin dalam produksi, sering kali memerlukan keterampilan yang lebih tinggi dan spesialisasi, sementara pekerjaan yang lebih sederhana atau rutin dapat terotomatisasi atau digantikan oleh teknologi. Ini dapat menyebabkan pengangguran struktural, di mana pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan

yang tersedia. Peningkatan pengangguran struktural dapat berkontribusi pada ketimpangan pendapatan, karena pekerja dengan keterampilan yang lebih rendah atau yang tidak memiliki akses ke pelatihan yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih canggih, mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang setara dengan pekerjaan mereka yang hilang; (5) Mobilitas sosial rendah; (6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (7) Nilai tukar yang memburuk bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat adanya ketidakstabilan permintaan terhadap barang ekspor negara sedang berkembang; (8) Hancurnya industri kerajinan masyarakat, seperti industri rumah tangga, pertukangan, dan lain-lain.

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan, terdapat beberapa metode yang seringkali digunakan, yakni: (A) Distribusi ukuran (*size distribution*). Menurut Todaro & Smith (2013), distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Adapun menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung presentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dengan total pendapatan penduduk. (1) Tingkat ketimpangan tinggi, apabila 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah menerima < 12 persen dari total pendapatan nasional suatu negara. (2) Tingkat ketimpangan sedang, apabila 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah menerima antara 12-17 persen dari total pendapatan nasional suatu negara. (3) Tingkat ketimpangan rendah, apabila 40 persen

penduduk yang berpendapatan rendah menerima > 17 persen dari total pendapatan nasional suatu negara. (B) Kurva Lorenz. Secara umum, kurva Lorenz merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Kurva ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1905 oleh ahli ekonomi asal Amerika Serikat, yang bernama Max Lorenz. Kurva Lorenz menjelaskan hubungan antara persentase masyarakat penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu. Kurva Lorenz digambarkan dengan bentuk bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase masyarakat penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase total pendapatan yang mereka dapatkan. Semakin lurus atau semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti semakin merata distribusi pendapatan pada suatu negara atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan semakin rendah, sebaliknya semakin melengkung atau semakin jauh kurva ini dengan diagonalnya, berarti semakin tidak merata distribusi pendapatan atau ketimpangan pendapatan akan menjadi semakin tinggi. (C) *Gini Ratio*. Menurut Todaro & Smith (2013), untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menggunakan *Gini Ratio*, dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan agregat suatu wilayah. Semakin tinggi angka *Gini Ratio* maka ketimpangan juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah angka *Gini Ratio* maka ketimpangan juga semakin rendah.

### 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara, guna mencapai suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, selama periode waktu yang telah ditentukan. Hasyim (2016) juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro & Smith, 2013). Wau dkk., (2022) menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output per kapita yang berkelanjutan (yang berupa barang dan jasa) yang menggunakan kapasitas produksi yang ada dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada yang belum digunakan secara optimal.

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu. Sukirno (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arsyad (2010), juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai

kenaikan *gross domestic product (GDP)/gross national product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Produk domestik bruto merupakan konsep dalam perhitungan pendapatan nasional (Sukirno, 2009). Adapun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Menurut Sukirno (2006) terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: (1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh penambahan

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal;

(2) Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori neoklasik berkembang sejak tahun 1950 an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neoklasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu;

(3) Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*);

(4) Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*)

dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada.

### **2.1.3 Dana Perimbangan**

Pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang didasarkan asas otonomi. Tujuan dari otonomi adalah peningkatan pembangunan daerah dalam berbagai sektor, sehingga dapat terwujud pemerataan pelayanan publik, peningkatan kemandirian daerah semakin nyata, dan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah mencakup desentralisasi fiskal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Menurut Oates (1999) bahwa desentralisasi fiskal memberlakukan fungsi dasar yaitu fungsi alokasi, yang mencakup kewenangan belanja daerah. Indonesia memiliki konsep desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan secara adil, transparan, proposional, dan akuntabel. Kebijakan desentralisasi fiskal adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah mampu mengeksekusi tugas tersebut sesuai arahan yang telah ditetapkan pemerintah pusat (Oates, 1999).

Desentralisasi fiskal menimbulkan pengelolaan keuangan yang terpisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari

daerah tersebut. Khusaini (2006) dalam Hakim (2014) mengemukakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah (*sub-national government*) daripada oleh pemerintah pusat karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Keuangan dalam desentralisasi fiskal bersumber dari pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan TKDD (Sandjaja *et al.*, 2020). TKDD yang diberikan ke pemerintah daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat menjadi sejahtera (Musviyanti *et al.*, 2022). TKDD terdiri dari dana perimbangan dengan tujuan untuk menurunkan tingkat ketidaksetaraan kapabilitas keuangan setiap daerah di wilayah Indonesia.

Wujud pemberian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan sendiri terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan elanja neNgara, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) ialah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perlu diketahui bahwa Dana Bagi Hasil termasuk sumber dari pendapatan yang berpengaruh serta menjadi modal dasar untuk pemerintah dalam memperoleh Dana Pembangunan dan juga memenuhi Belanja Daerah yang bukan dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Liando, 2017).

#### **2.1.4 Belanja Modal**

Pemerintah memiliki kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Proses pembangunan yang terus berjalan dan dikembangkan dari waktu ke waktu selalu berusaha untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan. Dalam arti lain, pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab yang harus menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi warga negaranya (Astuti, 2021). Pengeluaran pemerintah, yang juga dikenal sebagai *government expenditure* adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu upaya pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

untuk tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat daerah atau wilayah (Sukirno, 2006).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi. Hendaknya diketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional (Rohima, 2020).

Pengeluaran atau belanja pemerintah terdiri atas berbagai macam belanja, salah satunya ialah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik, 2023). Adapun menurut Bawono (2012) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut Halim (2016) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama: (a) Belanja Modal Tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengasongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai; (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai; (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang

menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai; (d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai; (e) Belanja Modal Fisik Lainnya. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Dana perimbangan adalah salah satu alat fiskal yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendistribusikan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan mengurangi ketimpangan. Dana perimbangan mencakup beberapa komponen, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan dalam desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah, percepatan pembangunan daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mampu mendorong terjadinya pemerataan ekonomi daerah (Canavire-Bacarreza *et al.*, 2019). Dana perimbangan berfungsi untuk meratakan

distribusi sumber daya keuangan antara daerah-daerah dengan kemampuan fiskal yang berbeda. Dana Alokasi Umum (DAU) dirancang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah-daerah dengan PAD yang tinggi dan rendah, dengan cara memberikan tambahan dana kepada daerah-daerah yang kurang mampu. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendukung proyek-proyek tertentu yang penting bagi pembangunan daerah, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) memastikan bahwa daerah yang menghasilkan sumber daya tertentu, seperti pajak dan royalti, dapat memperoleh bagi hasil yang adil. Semua komponen ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi antar daerah.

Alokasi DAU digunakan untuk pemerataan keuangan daerah dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada penurunan indeks gini di daerah (Ridho & Wijayanti, 2022). Sebaliknya, DAU belum mampu menurunkan indeks gini di daerah menurut Azizi (2018). DAK fisik adalah dana alokasi pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan fisik di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Azizi (2018), dan Ridho & Wijayanti (2022) menyatakan bahwa alokasi DAK fisik dapat menurunkan ketimpangan pendapatan secara nyata. Tetapi jika formulasi kebijakan tidak tepat maka DAK fisik berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Qomariyah dkk., 2018). DAK nonfisik pada sektor kesehatan yaitu DBOK, dapat membantu pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah (Fatihudin & Mauliddah, 2019; Furceri *et al.*, 2021). Dana Bagi Hasil sebagai alokasi dana perbaikan keseimbangan vertikal, memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di daerah (Azizi, 2018; Ridho & Wijayanti, 2022).

### **2.2.2 Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Dana perimbangan dalam TKDD erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Alokasi dana perimbangan yang telah di transfer pemerintah pusat ke daerah, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Dana perimbangan dalam desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah (Musviyanti *et al.*, 2022).

Dana Alokasi Umum memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan DAU yang ditransfer pusat ke daerah maka dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah DAU yang ditransfer pusat ke daerah, maka daerah dapat melakukan pembangunan yang menjadi skala prioritas daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas. Lebih jelas, dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah (Sidik, 2003).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus. DAK adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas

nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengalokasian DAK kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat berdasarkan kriteria tertentu, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan pembangunan yang akan mendorong aktifitas perekonomian dan percepatan pembangunan yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah (Sutedi, 2011).

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak pusat dan sumber daya alam. DBH yang ditransfer dari pusat ke daerah, akan digunakan untuk membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah karena pada dasarnya apa yang sudah diambil dan dikelola dari daerah akan dikembalikan lagi ke daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Transfer dana perimbangan seperti DBH ini akan sangat membantu bagi peningkatan pelayanan publik. Semakin tinggi pajak pusat yang dipungut daerah dan kekayaan alam daerah maka semakin tinggi pula dana bagi hasil yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan publik maka dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Merujuk Musviyanti *et al.* (2022) dan Nany & Suryarini (2022) bahwa alokasi DBH berhubungan positif signifikan terhadap perekonomian. Penelitian lainnya terdapat perbedaan temuan yang melaporkan bahwa DBH tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Pradana & Mun'im, 2022).

### **2.2.3 Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2006). Todaro & Smith (2013) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu, cara pemerintah mengalokasikan anggarannya dapat berdampak besar.

Belanja modal, melalui pembangunan infrastruktur, memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Infrastruktur yang dibangun melalui belanja modal, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Ketika pemerintah atau sektor swasta melakukan investasi besar dalam proyek infrastruktur, mereka memerlukan banyak tenaga kerja untuk merancang, membangun, dan memelihara proyek tersebut. Hal ini memberikan peluang kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya menganggur atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Dengan adanya kesempatan kerja yang lebih luas, pendapatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Sesuai dengan penelitian Sutiono dan Syafitri (2018) bahwa pengadaan belanja modal yang bersifat padat karya seperti pembangunan infrastruktur publik akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga memberikan penghasilan bagi para pekerja.

Pembangunan infrastruktur secara langsung memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di sektor konstruksi. Pekerjaan konstruksi mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari tenaga kerja kasar hingga profesional teknis seperti insinyur, arsitek, dan manajer proyek. Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan gedung-gedung publik membutuhkan ribuan pekerja selama fase perencanaan dan pelaksanaan. Ini membuka kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat. Selain penciptaan pekerjaan langsung di sektor konstruksi, pembangunan infrastruktur juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti manufaktur bahan bangunan, transportasi, dan logistik. Misalnya, kebutuhan akan semen, baja, dan bahan bangunan lainnya akan meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan produksi di industri-industri ini dan menciptakan pekerjaan tambahan. Juga, peningkatan aktivitas transportasi barang dan pekerja ke lokasi proyek infrastruktur mendorong permintaan untuk layanan transportasi, yang membuka lebih banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, peluang untuk mendapatkan penghasilan juga terbuka bagi berbagai kelompok keterampilan, baik bagi mereka yang memiliki pendidikan formal maupun yang tidak. Selain itu, upah yang diperoleh dari pekerjaan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan, karena mereka yang berada di lapisan ekonomi terbawah mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Penelitian Irawati (2019) juga mengungkapkan bahwa tingginya belanja modal guna menunjang kegiatan perekonomian suatu daerah akan mendorong peningkatan pada sektor kegiatan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak orang yang bekerja dan mendapat pendapatan/penghasilan akan membuat ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin berkurang.

#### **2.2.4 Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Model pertumbuhan endogen (Barro, 1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Salah satu pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sabir, 2015).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, misalnya pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Nugroho & Rohman (2012), peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran pemerintah yang digunakan untuk investasi pada infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, dan proyek-proyek lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Simorangkir (2022) dalam tulisannya menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja modal, seperti investasi dalam mesin, teknologi, dan infrastruktur fisik, dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Misalnya, pembangunan

jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik misalnya dapat memperlancar arus barang dan jasa, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar, perekonomian dapat tumbuh lebih cepat karena perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah.

Lebih lanjut Simorangkir menjelaskan bahwa Investasi dalam infrastruktur juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, universitas, dan rumah sakit juga memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Pendidikan adalah pondasi utama dalam membentuk keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu. Dengan akses ke pendidikan yang berkualitas, individu dapat mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Selain pendidikan, kesehatan juga memegang peranan penting. Ketika seseorang sehat, mereka memiliki energi dan kapasitas fisik serta mental yang optimal untuk bekerja secara efektif dan efisien. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk akses ke perawatan medis yang memadai, nutrisi yang baik, dan lingkungan yang sehat, dapat mengurangi tingkat penyakit dan cedera yang menghambat kemampuan kerja individu. Oleh karena itu, dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, masyarakat akan lebih produktif dan lebih mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang kemudian dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Namun, efek belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu positif. Jika belanja modal terfokus pada wilayah-wilayah yang sudah maju atau pada proyek-proyek yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat luas, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, di mana kelompok yang sudah kaya menjadi semakin kaya, sementara kelompok yang kurang mampu tidak merasakan perbaikan signifikan dalam pendapatan mereka. Oleh karena itu, perencanaan dan distribusi belanja modal harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa manfaatnya tersebar secara merata.

#### **2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Ada dua pandangan tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Salah satu pandangan ekonom mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Menurut Arsyad (2010) tujuan utama dari pembangunan ialah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Hal ini sesuai dengan Teori Kuznets. Teori Kuznets tentang ketimpangan, yang dikenal sebagai *Kuznets Curve* atau Kurva Kuznets, adalah konsep dalam ekonomi yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1950-an. Teori ini menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Kuznets menyatakan bahwa dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena sektor-

sektor tertentu, seperti industri, tumbuh lebih cepat dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor tradisional, seperti pertanian. Sebagian besar kekayaan dan keuntungan dari pertumbuhan ini terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok yang lebih mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Ketimpangan mencapai puncaknya pada suatu titik tertentu di tengah-tengah proses industrialisasi. Pada tahap ini, jurang antara yang kaya dan miskin berada pada tingkat tertinggi karena sebagian besar populasi belum sepenuhnya menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Setelah mencapai titik puncak, ketimpanganpun mulai menurun seiring dengan perkembangan ekonomi yang lebih lanjut. Faktor-faktor seperti peningkatan akses pendidikan, redistribusi pendapatan melalui kebijakan pemerintah, urbanisasi, dan diversifikasi ekonomi memungkinkan kelompok-kelompok yang sebelumnya tertinggal untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Teori lain tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ialah Teori *Trickel Down Effect*. Teori *Trickle Down Effect* (efek aliran turun) adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan yang memberikan insentif atau keuntungan kepada kelompok yang kaya atau pemerintah yang memiliki pendapatan tinggi akan mengalir turun ke kelompok yang lebih rendah dalam masyarakat secara alami melalui efek ekonomi yang lebih luas. Ide dasarnya adalah bahwa dengan memberikan insentif kepada orang-orang yang memiliki lebih banyak uang, mereka akan menghabiskan lebih banyak uang tersebut, yang akan mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun, teori *Trickle Down Effect* juga sering diperdebatkan. Kritikus menunjukkan bahwa dalam praktiknya, manfaat dari kebijakan yang

menguntungkan kelompok kaya tidak selalu mencapai mereka yang lebih rendah dalam hierarki ekonomi. Sebaliknya, kesenjangan pendapatan mungkin bertambah, dan keuntungan ekonomi yang didorong oleh kebijakan tersebut mungkin terakumulasi di tangan kelompok kaya tanpa banyak manfaat yang dirasakan oleh mereka yang berada di bawah. Dalam beberapa kasus, teori ini dianggap sebagai alasan untuk kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya yang lebih luas.

Pandangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ialah teori Karl Marx. Berbeda dengan teori *Trickle Down Effect*, teori ini justru menentang bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Menurut Marx, dalam konteks kapitalisme, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan, bukan menguranginya. Pandangan Marx ini berakar dalam analisisnya tentang eksploitasi ekonomi dalam sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, para pemilik modal (kapitalis atau pemilik perusahaan) mempekerjakan pekerja (buruh) untuk menghasilkan barang dan jasa. Pemilik modal membayar buruh dengan upah yang kurang dari nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja mereka. Akibatnya, kekayaan terus terakumulasi pada pemilik modal, sementara buruh tidak menerima kompensasi yang setara dengan nilai yang mereka hasilkan.

### **2.3 Studi Empiris**

Zhilal Ilvadea Violin, M. Yudhi Lutfi (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah

metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2010-2019.

Annisa Febriyani dan Ali Anis (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Dewi Septiani Dwi Kusuma, Dra. Sudati Nur Sarfiah, dan Yustirania Septiani (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari PDRB, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017, sedangkan Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017,

Ridho & Wijayanti (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, DAK dan DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Samuel Fery Purba & Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang (2024) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana perimbangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi DBH dan DBOK berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, DAU, DAK fisik, dan DBOP belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, alokasi DBOK dan DBOP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DBH, DAU, dan DAK fisik belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Muhammad Anshari, Zul Azhar, dan Ariusni (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan, upah minimum provinsi, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di

Indonesia, upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia, sedangkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia.

Hikmah Nurain dan Indri Arrafi Juliannisa (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, upah minimum provinsi, dan belanja modal pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan pada lima provinsi tertinggal di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kelima provinsi, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kelima provinsi, sedangkan Upah Minimum Provinsi dan belanja modal pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kelima provinsi.

Sinaga dkk., (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasilnya menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Fidelis Dwi Putra Santoso dan Imam Mukhlis (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal (DAU, DAK, dan

DBH), *Foreign Direct Investment*, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada masa sebelum pandemi COVID-19 serta perbandingan kondisi pada saat pandemi COVID-19. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis regresi data panel pada data sebelum pandemi dan analisis deskriptif pada data selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan, variabel Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, *Foreign Direct Investment*, dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif pada data selama pandemi COVID-19 didapatkan hasil bahwa kondisi ketimpangan pendapatan, desentralisasi fiskal (DAU, DAK, dan DBH), FDI, dan tenaga kerja di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 mengalami perubahan dimana seluruh aspek mengalami penurunan.

Waryanto (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal positif signifikan terhadap Sementara itu, belanja operasi yang belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini telah mempertimbangkan variabel kontrol berupa inflasi.

Gosal dkk., (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal dan belanja barang dan jasa serta pengaruhnya secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado tahun 2005-2021. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Belanja barang dan jasa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado dan secara bersama-sama belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado tahun 2005-2021.

Apriyesa & Miyasto (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan (studi kasus: kabupaten/kota di Jawa Tengah). Model analisis regresi menggunakan regresi biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

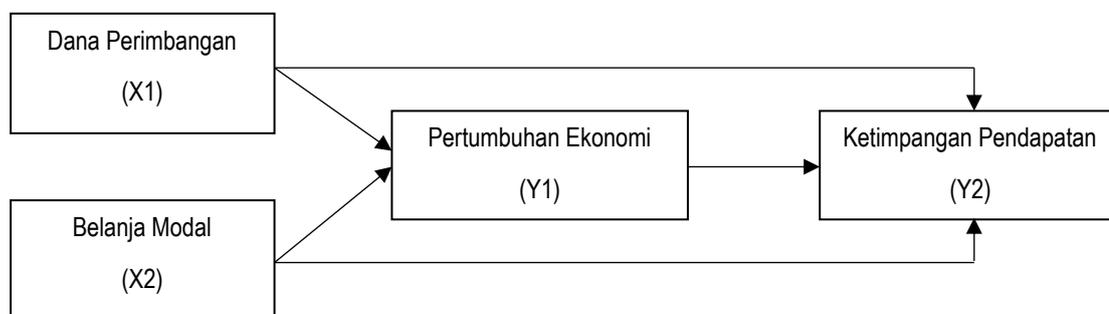
#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis menyusun kerangka konseptual dengan melihat pengaruh Dana Perimbangan ( $X_1$ ), dan Belanja Modal ( $X_2$ ) sebagai variabel independen melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) sebagai variabel intervening terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y_2$ ) sebagai variabel dependen di Pulau Sulawesi.

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Kebijakan fiskal meliputi berbagai instrumen seperti pendapatan dan pengeluaran pemerintah, dan transfer pembayaran yang semuanya dapat digunakan untuk mengurangi atau, dalam

beberapa kasus, memperburuk ketimpangan pendapatan, apabila alokasi anggarannya tidak tepat sasaran dan tidak adil atau tidak tersebar secara merata.

Dana perimbangan dan belanja modal berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Keduanya memainkan peranan yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan dan perbaikan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur melalui dana perimbangan dan belanja modal tidak hanya menciptakan lapangan kerja selama fase konstruksi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang memadai meningkatkan akses ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang semuanya berkontribusi dalam membantu mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Di bawah ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini yang digambarkan pada Gambar 2.1 berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dalam suatu penelitian, Dimana kebenarannya masih perlu dibuktikan atau harus dapat diuji secara empiris melalui

metode penelitian yang sesuai. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga belanja modal pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.